

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar kerangka pemikiran dari pengajuan hipotesis. Hal-hal yang akan disajikan pada bab ini mencakup tinjauan yang menjelaskan konsep dari variabel yang akan diteliti serta pembahasan tentang penelitian terdahulu. Selain itu, kerangka berpikir juga akan dijelaskan pada bagian ini. Kerangka berpikir ditulis untuk menjelaskan seperti apa model dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bahasan terakhir dari bab ini adalah hipotesis yang diajukan peneliti.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Senewe et al., 2021). Menurut Amarta (1987) dalam Wulandari & Rachmawati (2021) kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.

Menurut Nurwati (2008), kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

2.1.1.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2007) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dari ketiga pendekatan tersebut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran *Head Count Index*.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menurut menurut sifatnya yang terdiri atas:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang esensial untuk menjalani kehidupan. Penilaian kemiskinan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas umum atau kebutuhan pokok tersebut.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Di samping itu Nasution (1996) berpendapat bahwa kemiskinan dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural, dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung karena sistem lembaga yang mencakup tidak hanya organisasi tetapi juga peraturan yang ditetapkan. Kemiskinan struktural menciptakan situasi di mana sebagian anggota masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menguasai sumber daya ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia.

2. Kemiskinan Alamiah

kemiskinan alamiah terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan alam, penggunaan teknologi yang kurang maju, dan dampak bencana alam. Dalam kondisi di mana sumber daya manusia dan alam memiliki kualitas yang rendah atau terbatas, peluang produksi menjadi terbatas atau tingkat efisiensi produksi menjadi rendah.

2.1.1.4 Penyebab Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sangat bervariasi antar wilayah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, faktor sosial, dan bahkan sistem politik yang berlaku. Kemiskinan merupakan masalah yang umum ditemukan di negara-negara berkembang, dan masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat kemajuan negara-negara tersebut.

Sharp (1996) dalam Abdul et al. (2016) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Nurkse (1953), yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

2.1.1.5 Teori-Teori Kemiskinan

1. Teori Kemiskinan Struktural (*Structural Poverty Theory*)

Teori dikemukakan oleh Lewis (1966), yang menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat dari faktor individu, seperti kurangnya keterampilan atau rendahnya motivasi, tetapi lebih disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak mendukung mobilitas ekonomi masyarakat miskin.

2. Teori Lingkaran Setan (*vicious circle of poverty*)

Teori ini dikemukakan oleh Nurkse (1953), yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia yang rendah, sehingga menyebabkan produktivitas rendah.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

2.1.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Pendapatan perkapita atau PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah atau total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hasbi et al. (2019) Pendapatan perkapita ialah besarnya pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara maka negara tersebut dikatakan makmur, sedangkan apabila suatu negara pendapatan perkapitanya rendah maka suatu negara tersebut dikatakan belum makmur.

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan suatu kemampuan daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

PDRB per kapita adalah turunan dari PDRB, terdapat dua ukuran PDRB per kapita yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga

konstan yaitu bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah (BPS). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut karena besarnya pendapatan masyarakat. Adapun rumus PDRB perkapita sebagai berikut:

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.2.2 Proses Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

1. Faktor Ekonomi

a) Sumber Alam

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

b) Akumulasi Modal

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat dibidang ekonomi.

c) Organisasi

Organisasi bersifat melengkapi dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

d) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.

e) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non-Ekonomi

a) Faktor Sosial

Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

b) Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

c) Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korupsi, dengan demikian amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1995) ada enam ciri-ciri pertumbuhan yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, dimana ciri-ciri tersebut seringkali terikat satu sama lain. Keenam ciri tersebut yaitu:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk perkapita yang tinggi.
2. Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita.
3. Laju perubahan struktural yang tinggi yang mencakup kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa dan peralihan usaha-usaha perseorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.
4. Semakin tingginya tingkat urbanisasi.
5. Ekspansi dari negara lain.
6. Peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa.

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut para ekonom yang mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyelidikan yang telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Terdapat banyak tokoh beserta pemikiran atau teori mereka mengenai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sejauh ini. Berikut ialah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Solow-Swan Growth Model*)

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow (1956), menjelaskan bagaimana akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi

jangka panjang hanya dapat dipertahankan melalui inovasi teknologi karena modal dan tenaga kerja mengalami *diminishing returns*.

2. Teori Pertumbuhan Endogen

Menurut Romer (1986) teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berasal dari akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga dari investasi dalam modal manusia (pendidikan, keterampilan) dan inovasi teknologi. Romer menyoroti bahwa pengetahuan dan inovasi adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Teori Pertumbuhan Kuznets (Hubungan Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi)

Kuznets (1955) berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan meningkat, tetapi setelah mencapai titik tertentu, ketimpangan akan menurun (kurva Kuznets berbentuk U terbalik). Teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berdampak berbeda terhadap distribusi pendapatan dalam suatu negara.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.3.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan menyatakan bahwa pembangunan manusia (*human development*) senantiasa berada di garda terdepan yang dirumuskan sebagai perluasan pilihan

bagi penduduk (*enlarging the choice of people*) yang merupakan proses ke arah perluasan pilihan. Pilihan yang terpenting yakni untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Menurut UNDP (1990), indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Berdasarkan kajian tentang capaian indeks pembangunan manusia menurut UNDP, IPM dikelompokkan kedalam beberapa kategori diantaranya :

1. $IPM < 60$ = IPM rendah
2. $60 < IPM < 70$ = IPM sedang
3. $70 < IPM < 80$ = IPM tinggi
4. $IPM < 80$ = IPM sangat tinggi

2.1.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993)

1. Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortalityrate*.

2. Indeks Pendidikan (*Educational Achievement*)

Diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (*the mean years of schooling*).

3. Akses Terhadap Sumber Daya (*Access to resource*)

Dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

2.1.3.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran IPM menggunakan metode baru tahun 2013. Indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yakni:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir dan tingkat kematian bayi.
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = (X1 + X2 + X3) / 3$$

Keterangan:

X1 = indeks harapan hidup

X2 = tingkat pendidikan

X3 = standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

$$I = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmax - AHHmin}$$

Keterangan:

I = Indeks angka harapan hidup

AHH = Angka harapan hidup

AHHmin = Angka harapan hidup terendah

AHHmax = Angka harapan hidup tertinggi

2. Dimensi Pendidikan

$$I = \frac{IHLS + IHRS}{2}$$

Keterangan:

I = Indeks komponen

HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

3. Dimensi Pengeluaran (ekonomi)

$$I = \frac{P - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

Keterangan:

I = Indeks pengeluaran

P = Angka pengeluaran

P_{min} = Angka pengeluaran terendah

P_{max} = Angka pengeluaran tertinggi

2.1.3.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut badan pusat statistik (BPS), manfaat IPM diantaranya:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.3.5 Teori-Teori Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa tokoh beserta pemikiran atau teori mereka mengenai indeks pembangunan manusia sejauh ini. Berikut ialah teori mengenai indeks pembangunan manusia, antara lain:

1. Teori Modal Manusia (*Human Capital*)

Teori ini dikemukakan oleh Becker (1964) yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan

kualitas modal manusia. Adapun ekonom lainnya yang juga berkontribusi pada teori modal manusia yaitu Theodore Schultz. Schultz (1961) meneliti tentang peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

2. Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*)

Sen (1999) dalam teorinya menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu variabel penelitian mencerminkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.4.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Mankiw dalam Sugianto & Yul (2020), pengertian pengangguran yang ditetapkan secara internasional adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak memperoleh pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ada melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari

pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1995), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dihitung sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2016) jenis-jenis pengangguran dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya, yaitu:

1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya

a. Pengangguran normal atau friksional

Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang terjadi karena keinginan seseorang dalam mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sehingga mendorong para pekerja meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keahliannya atau

gaji yang lebih tinggi. Seseorang yang dalam mencari pekerjaan yang baru untuk sementara para pekerja ini termasuk dalam golongan sebagai penganggur. Penganggur ini yang disebut sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya permintaan agregat. Kemerosotan permintaan agregat ini akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaan, dan akan mengakibatkan pengangguran bertambah.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural ialah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan pada struktur kegiatan ekonomi yang mengakibatkan kemerosotan pada industri dan perusahaan. Kemerosotan ini akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut akan menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi ialah pengangguran yang terjadi akibat adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

2. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka disebabkan lebih rendahnya lowongan pekerjaan dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi ialah pengangguran terjadi ketika didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim ini terjadi pada setiap pergantian musim. Terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, jika musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur.

d. Setengah Menganggur

Setengah menganggur ialah menganggur terjadi akibat seseorang migrasi dari desa ke kota. Akan tetapi tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sehingga terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Ada juga yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja yang jauh lebih rendah dari pekerja normal. Dengan demikian, pekerja yang mempunyai masa kerja seperti itu tergolong sebagai setengah menganggur.

2.1.4.3 Faktor Penyebab Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu hal yang tidak biasa dihindari di berbagai negara, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor penyebab terjadinya pengangguran, yaitu (Franita, 2016):

1. Tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan angka tenaga kerja.
2. Kurangnya keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh para pencari kerja sehingga tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
3. Kurangnya informasi dalam akses mencari tahu tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan
5. Budaya malas yang masih melekat pada masyarakat yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

2.1.4.4 Dampak Pengangguran

Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Apabila keadaan penganggur di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka Panjang (Sukirno, 2016).

Menurut Franita (2016), beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran, yaitu:

1. Dampak buruk bagi perekonomian akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Menganggur akan berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi dan menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Dampak buruk dari segi sosial menyebabkan banyaknya tindakan kriminal, dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan membuat mereka melakukan tindakan kejahatan.
3. Dari segi mental akan menimbulkan depresi karena kurangnya kepercayaan diri dan keputusan.
4. Dari segi politik akan membuat banyaknya demonstrasi.

2.1.4.5 Teori-Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

Terdapat beberapa tokoh beserta pemikiran atau teori mereka mengenai pengangguran sejauh ini. Berikut ialah teori mengenai pengangguran, antara lain:

1. Teori Pengangguran Keynesian

Keynes (1936) berpendapat bahwa pengangguran dapat terjadi karena kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan nasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Menurut Keynes, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran.

2. Teori Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*)

Teori ini masih berkaitan dengan teori keynesian. Keynes (1936) menjelaskan bahwa pengangguran siklis terjadi akibat fluktuasi dalam siklus

ekonomi. Saat ekonomi mengalami resesi atau depresi, permintaan terhadap barang dan jasa turun, sehingga perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK pekerja. Sebaliknya, saat ekonomi pulih, permintaan meningkat dan lapangan kerja bertambah.

3. Teori Pengangguran Struktural

Dunlop & Duesenberry (1950) menyatakan bahwa pengangguran dapat terjadi karena adanya masalah struktural dalam perekonomian, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran jangka panjang dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Menurut teori ini, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural untuk mengatasi masalah pengangguran.

2.1.5 Infrastruktur Air Bersih

2.1.5.1 Pengertian Infrastruktur

Secara umum, infrastruktur adalah fasilitas dan layanan dasar yang digunakan oleh masyarakat luas, atau dengan kata lain dikenal sebagai sarana publik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur merupakan elemen yang sangat vital. Tanpa keberadaannya, proses produksi di berbagai sektor ekonomi

tidak akan dapat berlangsung. Infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2006).

Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik kapital (*modal public*) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur memiliki sifat sebagai barang publik yang dapat digunakan dan dibutuhkan oleh semua orang, sehingga penggunaannya tidak dapat dibatasi dan tidak memerlukan biaya untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari infrastruktur tersebut.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Infrastruktur

Menurut *World Bank Report* (Bank Dunia, 1994) dalam Kusuma (2019) Infrastruktur dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi dan drainase), serta sektor transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang).

2. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat yang meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan), serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain-lain).

3. Infrastruktur Administrasi/Institusi

Infrastruktur administrasi/institusi meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

2.1.5.3 Infrastruktur Air Bersih

Air memegang peranan krusial dalam kelangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan air bersih menjadi faktor utama dalam menjamin keberlangsungan hidup. Dalam berbagai aspek kehidupan, air sangat diperlukan, mulai dari kebutuhan pokok, rumah tangga, layanan publik, industri, perdagangan, pertanian, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa air merupakan salah satu kebutuhan esensial yang wajib dipenuhi bagi setiap manusia. *Integrated Water Resources Management* (IWRM) adalah pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan air yang mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini diperkenalkan tahun 1992 oleh *Global Water Partnership* (konsep dikembangkan secara kolektif) yang menekankan pentingnya pengelolaan air bersih sebagai bagian dari sistem infrastruktur berkelanjutan.

Air bersih adalah air yang sumbernya sudah memenuhi syarat kualitas atau dari bangunan pengolahan air minum sampai distribusi. Perusahaan air minum daerah (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak di bidang distribusi air bersih untuk masyarakat umum di bawah pengawasan oleh penegak dan badan legislatif daerah. Penyediaan sumber daya ini menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan, di mana infrastruktur air mencakup kebutuhan akan air minum, air untuk industri, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, serta sanitasi. Apabila infrastruktur air tersedia secara memadai dan berkualitas, hal ini dapat

berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung peningkatan tingkat kesehatan masyarakat, diperlukan distribusi air bersih dan sistem sanitasi yang layak.

2.1.5.4 Teori-Teori Infrastruktur Air Bersih

1. Teori Barang Publik

Dalam artikelnya "*The Pure Theory of Public Expenditure*", Samuelson (1954) memperkenalkan konsep barang publik, yang memiliki dua ciri utama yaitu *non-rivalry* (penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain) dan *non-excludability* (sulit membatasi siapa yang dapat mengaksesnya). Infrastruktur air bersih termasuk dalam kategori ini karena ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui antara variabel X dan Y yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang dilaksanakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Imantria (2024) <i>Determinants of Poverty in Indonesia: Does Per Capita Income Matter?</i>	Akses Terhadap Air Bersih, Pengangguran dan Kemiskinan	Pendapatan per kapita, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, Akses terhadap listrik, Koefisien Gini, dan garis kemiskinan	Akses terhadap air bersih memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics Vol 7 (3) (2024) : 244-256
2	Budiono & Purba (2022) <i>Reducing poverty strategy through educational participation, clean water, and sanitation in Indonesia</i>	Air Bersih dan Kemiskinan	Partisipasi Pendidikan dan Sanitasi	Air bersih memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 25 No. 1 April 2022, 177 - 198
3	Irawan (2022) <i>The Effect Of Unemployment, Economic Growth And Human Development Index On Poverty Levels In Sumbawa Regency In 2012-2021</i>	Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	IPM menunjukkan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	International Journal of Economics, Business and Accounting Research Vol-6, Issue-2, 2022
4	Lestari et al. (2021) <i>Does Human Development Index (HDI), Investment, and Unemployment Effects on Economic Growth and Poverty Levels? (A Case Study in Bali)</i>	Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan	Investasi dan pertumbuhan ekonomi	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	American Journal of Humanities and Social Sciences Research e-ISSN :2378-703X Volume-5, Issue-2, pp-416-426

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Hutagaol et al. (2021) <i>An Analysis on the Influence of Population Growth Rate, Economic Growth, Human Development Rate toward Poverty in All Provinces in Indonesia</i>	Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan	Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Distribusi Pendapatan	Tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.	International Journal of Research & Review Vol.6; Issue: 1; January 2019
6	Kirana & Ayuningsasi (2022) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi	Secara parsial IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, 2018, 217 – 240 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316
7	Ristika et al. (2021) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk	IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), November 2021, 129-136
8	Ishak et al. (2020) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar	Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan	Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.	PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI Volume 3. No. 2 (2020); April
9	Anam et al. (2024) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika	Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan	Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
10	Sari (2021) Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Upah Minimum dan Jumlah Penduduk	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.	Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume 10. No. 2. Tahun 2021
11	Wulandari & Rachmawati (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan.	INDEPENDENT : Journal Of Economics Volume 1 Nomor 3, Tahun 2021
12	Purboningtyas et al. (2020) Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan		Secara parsial TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Sains dan Matematika Unpam Vol. 3, No. 1 (2020)
13	Saputra & Ginting (2024) Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Struktur Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Kota Bukittinggi	PDRB dan Kemiskinan	Pendidikan dan Struktur Angkatan Kerja	PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
14	Karimah et al. (2024) Pengaruh PDRB Per Kapita , IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa	PDRB Per Kapita, IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan		PDRB per Kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, Vol. 2, No. 1,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tenggara Barat (2020-2022)			IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	2024: 99-105
15	Monoarfa et al. (2022) Analisis Pengaruh Infrastruktur Pelayanan Dasar Terhadap Kemiskinan Di Kota Kotamobagu	Infrastruktur Air Bersih dan Kemiskinan	Infrastruktur Air Limbah dan Infrastruktur Jalan	Infrastruktur air bersih berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. No 3 (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Agar memudahkan penulis dalam mengerjakan penelitian ini, maka dimunculkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.

2.3.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Dengan Tingkat Kemiskinan

Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya PDRB per kapita berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah (Saputra & Ginting, 2024). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah, semakin tinggi tingkat pendapatan wilayah tersebut. Namun, PDRB per kapita tidak menjamin bahwa semua penduduk akan merasakan

kemakmuran. PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan masyarakat. Kenaikan PDRB per kapita tidak dapat secara langsung menyimpulkan apakah kondisi penduduk berpenghasilan rendah telah membaik atau belum.

Hubungan PDRB per kapita negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra & Ginting (2024) yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya jika PDRB per kapita naik, ini bisa berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Kenaikan PDRB per kapita menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Karimah et al. (2024) menyatakan sebaliknya bahwa PDRB per kapita secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh H. P. Putra et al. (2022) bahwa PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, meskipun peningkatan PDRB per kapita seharusnya menurunkan angka kemiskinan, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk disimpulkan sebagai pengaruh yang konsisten. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan PDRB tidak selalu mencerminkan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB per kapita sering kali terkonsentrasi pada sektor-sektor

tertentu atau dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat miskin.

2.3.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Tingkat Kemiskinan

Kualitas hidup manusia diduga mampu menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kualitas hidup manusia dicerminkan lewat indeks pembangunan manusia (IPM). IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yang mengukur kualitas hidup manusia, seperti: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (BPS, 2020). IPM merupakan salah satu parameter pembangunan di suatu daerah yang berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi angka IPM menandakan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik. Angka tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesehatan, tingkat pendidikan yang tinggi, dan tingkat hidup yang layak (Ristika et al., 2021).

Hubungan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawan (2022) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan teori modal manusia (*Human Capital*) yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga tingkat kemiskinan makin menurun. Menurut Irawan (2022) investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan bagi penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kerjanya.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purboningtyas et al. (2020) menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup tidak menurunkan tingkat kemiskinan. Ini bisa terjadi jika faktor lain seperti distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan kebijakan ekonomi lebih berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

2.2.3 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hubungan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kirana & Ayuningsasi (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) dinyatakan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan masyarakat tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin meningkatnya pengangguran maka akan semakin tidak produktif masyarakatnya, mengakibatkan masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskinan tersebut. Menurut Ishak et al. (2020) bahwa dampak dari pengangguran yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai

seseorang. Semakin turunnya tingkat kemakmuran karena menganggur akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

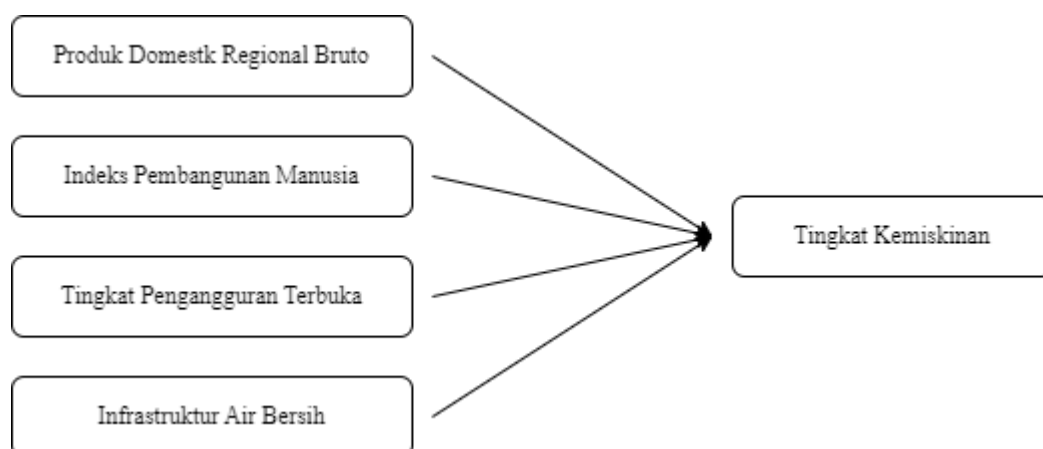
Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristika et al. (2021) menyatakan bahwa TPT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hubungan TPT yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan membuktikan bahwa penduduk yang menganggur belum tentu orang-orang yang berpendapatan rendah, atau mereka yang menganggur masih dibiayai oleh orang yang berpendapatan cukup. Selain itu, tidak semua pengangguran sementara itu selalu miskin. Biasanya mereka mencari pekerjaan karena baru lulus dari sebuah lembaga pendidikan, sedang menyiapkan usaha, maupun sudah memiliki pekerjaan namun belum aktif bekerja.

2.2.4 Hubungan Infrastruktur Air Bersih Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hubungan ketersediaan air terhadap kemiskinan masih terus dikaji. Walaupun masih dalam perdebatan, ketersediaan air bersih dapat dikaitkan dengan pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah atau negara. Keraguan terhadap kemampuan penyediaan air bersih dalam mengurangi penduduk miskin masih tetap mengalami banyak tantangan. Seperti hasil penelitian dari Monoarfa et al. (2022) yang menyatakan bahwa infrastruktur air bersih berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, meskipun infrastruktur air bersih dapat mengurangi kemiskinan, tetapi hubungan tersebut masih lemah dan tidak cukup kuat untuk disimpulkan sebagai hubungan kausal yang konsisten. Hal ini terjadi akibat dari distribusi manfaat yang tidak merata, biaya sosial atau ekonomi yang

bersifat sementara, serta intervensi pembangunan yang tidak selalu langsung menyasar akar kemiskinan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembawa et al. (2024) menunjukkan bahwa infrastruktur air bersih berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini didukung juga oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imantria (2024) yang menyatakan bahwa akses terhadap air bersih memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang artinya, setiap peningkatan pembangunan infrastruktur air bersih dapat menurunkan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ketersediaanya. Peran air bersih dalam bidang industri dan perniagaan adalah pendorong terselenggaranya sektor-sektor usaha. Peran air bersih didalam sosial dan non niaga merupakan penunjang kehidupan masyarakat yang berkualitas (Pembawa et al., 2024).



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan permasalahan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya yaitu:

1. Diduga secara parsial produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan infrastruktur air bersih berpengaruh negatif, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2015-2023.
2. Diduga secara bersama-sama produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan infrastruktur air bersih berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2015-2023.